
SIKAP GURU TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSI

Erna Fitriatun, Nopita

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP Mataram)

Jl. Pemuda No.59 A Mataram

ernafitriatun83@gmail.com

ABSTRAK

Satu lagi wacana tentang sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu pendidikan inklusi. Sistem pendidikan ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapa pun yang hendak menempuh program pendidikan, tidak hanya bagi anak-anak yang memiliki tingkat kegeniusan tinggi tetapi juga bagi mereka yang dianggap berbeda dan terbelakang dari anak-anak normal lainnya. Namun dalam tataran praktis, tentu sistem pendidikan ini akan menemui banyak kendala. Salah satu kendala yang terbayangkan adalah bagaimana seorang guru bersikap dalam penanganan suatu kelas yang sangat heterogen. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sikap yang dimiliki guru terhadap pendidikan inklusi. Dimana metode yang digunakan adalah *library research*. Selanjutnya, hasil kajian pustaka menuliskan ada dua sikap guru terhadap inklusi yaitu sikap menerima dan sikap menolak atau sikap positif dan sikap negatif.

Kata kunci : Pendidikan inklusi, Sikap guru terhadap pendidikan inklusi

ABSTRACT

One more discourse about the educational system for children with special needs is inclusive education. This educational system provides the widest possible opportunity for anyone seeking an education program, not only for children with high levels of genius but also for those who are considered different and retarded compared to normal children. But in practical level, of course this education system will encounter many obstacles. One of the conceivable constraints is how a teacher behaves in the handling of a very heterogeneous class. This study aims to determine the attitudes of teachers to inclusive education. The method used is library research. Furthermore, the results of literature review indicates that there are two attitudes of teachers to inclusion, those are acceptance and rejection attitude or positive attitude and negative attitude.

Keywords: Inclusive education, teacher's attitude toward inclusive education

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kehadiran pradigma pendidikan inklusi dalam dunia pendidikan formal seolah menjadi jawaban atas semboyan lama “pendidikan untuk semua”. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan untuk semua menjadi awal pemikiran dalam menjalankan sebuah layanan pendidikan yang tidak bersifat diskriminatif terhadap siapa pun, termasuk kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal ini sesuai dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009, pasal 2, disebutkan bahwa pemerintah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai

keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Adapun contoh kasus diskriminatif yang sering terjadi pada anak berkebutuhan khusus adalah pada saat penerimaan siswa baru maupun akses untuk sekolah (Elisa dan Warastari, 2013).

Permasalahan akses anak untuk sekolah inilah juga yang melatar belakangi lahirnya pendidikan inklusi. Sebagaimana yang kita ketahui, bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama ini ada tiga yaitu: (1) Lembaga Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB); (2) Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa dan (3) Lembaga Pendidikan Sekolah Terpadu. Karena keberadaan tiga layanan pendidikan tersebut yang kurang merata di setiap daerah sehingga, menyebabkan banyaknya anak berkebutuhan khusus yang usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan inklusi yang tercantum dalam Permendiknas No 70 Tahun 2009, Bab 1 Pasal 2.

Pemberian pendidikan yang bermutu bagi anak berkebutuhan khusus tentunya merupakan tantangan bagi pengelola sekolah, terutama untuk guru. (Taylor dan Ringlaben (2012) menyatakan bahwa dengan adanya pendidikan inklusi menyebabkan tantangan baru pada guru, yaitu dalam hal melakukan perubahan yang signifikan terhadap program pendidikan dan mempersiapkan guru-guru untuk menghadapi semua kebutuhan siswa baik siswa berkebutuhan khusus maupun non berkebutuhan khusus.

Perubahan-perubahan yang diharapkan dalam pendidikan inklusi itulah yang menyebabkan perubahan sikap yaitu perbedaan sikap guru dalam menerima sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dimana, pemahaman akan sikap guru terhadap inklusi sangat penting untuk perencanaan program di masa depan (Mahat, 2008). Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang sikap guru terhadap inklusi.

RUMUSAN MASALAH

Sikap guru terhadap pendidikan inklusi adalah isu yang penting dalam pengimplementasian inklusi. Sehingga rumusan masalah yaitu “Apakah sikap yang dimiliki guru terhadap inklusi?”

TELAAH PUSTAKA

1. Pengertian Guru Pendidikan inklusi

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2013) membagi tenaga pendidik dalam pendidikan inklusif menjadi tiga yaitu:

a. Guru kelas

Ada beberapa tugas utama guru kelas, sebagai berikut:

- 1) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar dikelas atau sekolah.
- 2) Menyusun dan melaksanakan asesmen akademik dan non akademik pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya bersama guru pembimbing khusus (GPK).
- 3) Menyusun rencana pembelajaran atau program pembelajaran individual (PPI) bersama-sama dengan GPK.
- 4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran, penilaian dan tindak lanjut sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan.

- 5) Memberikan program pembelajaran remedial (*remedial teaching*) pengayaan atau percepatan sesuai kebutuhan peserta didik.
- 6) Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.
- 7) Menyusun program dan melaksanakan praktik bimbingan bagi semua siswa.

b. Guru mata pelajaran

Terdapat beberapa tugas guru mata pelajaran di kelas inklusif, antara lain:

- 1) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas atau sekolah.
- 2) Menyusun dan melaksanakan asesmen akademik pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya.
- 3) Menyusun rencana pembelajaran atau program pembelajaran individual (PPI) bersama guru pembimbing khusus (GPK).
- 4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran, penilaian dan tindak lanjut sesuai dengan rencana pembelajaran atau PPI yang telah ditetapkan.
- 5) Memberikan program remedi pengajaran (*remedial reaching*), pengayaan atau percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.

c. Guru pembimbing khusus (GPK)

Tugas pokok GPK antara lain sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar dan inter tenaga pendidikan dan kependidikan, serta masyarakat.
- 2) Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha dan lain-lain).
- 3) Menyusun instrumen asesmen akademik dan non akademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
- 4) Menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
- 5) Menyusun program layanan kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- 6) Melaksanakan pendampingan dan atau pembelajaran akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran.
- 7) Memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan.
- 8) Melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi peserta didik yang membutuhkan.
- 9) Melaksanakan layanan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.
- 10) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
- 11) Melaksanakan *case conference* (bedah khusus) bersama tenaga ahli, kepala sekolah, guru, orangtua dan pihak-pihak terkait.

2. Pengertian Pendidikan Inklusi

Berbicara pendidikan inklusi adalah berbicara semua anak. Anak adalah sebagai pribadi yang unik, sebagai pribadi unik mereka memiliki perbedaan, perlu tumbuh kembang dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik anak, maka perlu adanya sistem pendekatan atau layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Pendidikan inklusi adalah “sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu”(Kstawan, 2013).

Sistem yang terbuka bagi semua individu memiliki makna semua peserta didik belajar bersama-sama baik di kelas atau sekolah formal maupun nonformal yang berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Selain itu, pengertian tentang pendidikan inklusi juga dituangkan dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Pasal 1 bahwa: pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik.

3. Tujuan Pendidikan Inklusi

Pasal 2 Permendiknas No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan inklusi adalah:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

4. Landasan Pendidikan Inklusi

Mudjito (2013) menuliskan dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (sesuai Permendiknas No.70 Tahun 2009) bahwa dalam penerapan pendidikan inklusi mempunyai beberapa landasan yuridis yaitu:

- a. Landasan internasional yaitu *Salamanca statement and framework for action on special need education* pada tahun 1994. Salah satu isinya menyatakan bahwa sekolah reguler dengan orientasi inklusi tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusi dan mencapai pendidikan untuk semua; lebih jauh, sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan.
- b. Landasan nasional, yaitu :
 - 1) UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan ayat 2 berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
 - 2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 :
 - Ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

- Ayat (2) : Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
 - Ayat (3) : Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
 - Ayat (4) : Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 48 dan pasal 49. Pada pasal 48 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Sedangkan pasal 49 menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- 4) UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pasal 5 yang berbunyi “setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Deklarasi Bandung “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 18-14 Agustus 2004.

5. Isu dan Permasalahan Pendidikan inklusi

Masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan inklusi merupakan isu yang sangat sensitif bagi anak yang dianggap berkelainan, karena bagaimanapun isu tersebut akan berdampak pada kepercayaan mereka ketika memasuki pendidikan formal dan berkumpul dengan anak normal pada umumnya. Penelitian Sunardi (2009) dalam Ilahi (2013) terdapat lima isu dan permasalahan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi yaitu:

a. Pemahaman dan pengimplemtasiannya

Pemahaman orang tentang anak berkebutuhan khusus harus diluruskan karena mereka tidak biasa dianggap sebagai anak yang selalu termarginalkan dari lingkungan mereka tinggal. Sementara dalam implementasinya, guru cenderung belum mampu bersikap *proactive* dan ramah terhadap semua anak.

b. Kebijakan sekolah

Keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya didukung oleh perhatian pemerintah melalui bantuan dana pendidikan dan fasilitas pendukung lainnya yang sangat dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus, tetapi juga menyangkut kebijakan sekolah.

c. Proses pembelajaran

Permasalahan inti dari pendidikan inklusi menyangkut persoalan proses pembelajaran yang belum menggunakan sistem *team teaching* sehingga menjadikan anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam menerima materi pelajaran. Selain itu, permasalahan sistem pengajaran juga belum memberikan jaminan akan keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam menangkap materi. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas dan media pembelajaran.

d. Kondisi guru

Kondisi guru juga perlu dipertanyakan mengenai masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan kualitas dan komitmennya dalam membina dan mengayomi anak berkebutuhan khusus. Komitmen seorang guru perlu dipertanyakan karena bisa saja mereka kurang bergairah dalam menangani anak berkebutuhan khusus.

e. Support system

Sistem pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusi harus diakui masih belum memadai. Sistem pendukung tersebut bisa dari orangtua yang belum memiliki perhatian penuh kepada anak mereka yang menginginkan sekolah di lembaga formal karena takut mendapatkan cacian dan hinaan dari teman sebangkunya.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui apa saja sikap guru terhadap pendidikan inklusi.

MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini diperoleh manfaat secara teoritis yaitu dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pendidikan inklusi khususnya sikap guru terhadap pendidikan inklusi.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tulisan ini, penulis mengumpulkan informasi melalui penelusuran kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan merupakan kerangka acuan yang disusun berdasarkan kajian aspek, baik teoritis maupun empiris yang menumbuhkan gagasan. Kajian pustaka diharapkan memberikan gambaran tentang kaitan upaya pengembangan dengan upaya-upaya lain yang mungkin sudah pernah dilakukan para ahli untuk mendekati permasalahan yang sama atau relatif sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah sikap guru terhadap pendidikan inklusi

Pendidikan inklusi tidaklah sekedar menempatkan siswa berkelainan secara fisik dalam kelas/sekolah reguler dan bukan pula sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus sebanyak mungkin dalam lingkungan belajar siswa normal. Lebih dari itu, pendidikan inklusi juga berkaitan dengan cara guru menyambut semua siswa dalam kelas dengan secara langsung mengenali nilai-nilai keanekaragaman siswa.

Guru merupakan salah satu tokoh penting dalam praktek inklusi di sekolah. Karena guru berinteraksi secara langsung dengan para siswa, baik siswa yang berkebutuhan khusus maupun siswa non berkebutuhan khusus. Selain itu, seorang guru juga memiliki peran yang vital dalam mengatur segala proses dan perencanaan pembelajaran sampai pada tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti setiap materi pelajaran. Hal ini sesuai dengan tugas utama seorang guru kelas dalam sekolah inklusi yaitu: (1) Menciptakan iklim belajar yang kondusif; (2) Menyusun dan melaksanakan asesmen akademik dan non akademik pada semua anak; (3) Menyusun PPI bersama GPK; (4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian; (5) Memberikan program pembelajaran remedial; (6) Melaksanakan administrasi kelas dan (7) Menyusun program dan melaksanakan praktik bimbingan bagi semua siswa (Mudjito, 2013).

Maka dari itu, luasnya cakupan tugas utama seorang guru inklusi di dalam kelas sehingga menuntut profesionalitas seorang guru. Ilahi (2013) profesionalitas seorang guru sangat penting dalam menciptakan nuansa pembelajaran yang egaliter dan progresif. Dimana, guru-guru yang ditempatkan pada pendidikan inklusif harus menguasai fungsi dan tugas yang lebih baik, bila dibandingkan dengan guru pendidikan di sekolah reguler (Mudjito, dkk., 2012).

Selain itu, seorang guru harus mencerminkan sikap kasih sayang, kehangatan, kegembiraan, persahabatan dan sikap-sikap lain yang berhubungan dengan motivasi pembelajaran dalam penerapan program pendidikan inklusi (Ilahi, 2013).

Gusniarti dan Lasarie (2009) menuliskan fenomena dalam pengimplemtasian inklusi yaitu di dalam penerapan program pendidikan inklusi di sekolah menimbulkan dua pilihan sikap bagi guru yang mengajar, apakah para guru menerima penerapan pendidikan inklusi atau menolak penerapan pendidikan inklusi tersebut.

Menurut Wrastari dan Elisa (2013) sikap guru terhadap pendidikan inklusi adalah gambaran yang positif atau negatif dari komitmen guru dalam mengembangkan anak berkebutuhan khusus yang menjadi tanggungjawab guru dan juga menggambarkan sejauh mana anak berkebutuhan khusus di terima di sebuah sekolah. Sedangkan Mahat (2008) mendefinisikan sikap guru terhadap inklusi adalah respon guru secara kognitif, afektif dan konatif terhadap pendidikan inklusif yang mencakup fisik, sosial dan kurikulum.

Penelitian yang dilakukan Wrastari dan Elisa (2013) menghasilkan bentuk sikap guru terhadap inklusi yang terdiri dari sikap positif yaitu sikap menerima terhadap pendidikan inklusi dan sikap negatif yaitu sikap menolak terhadap pendidikan inklusi. Selain itu, Ringlaben (2012) menyatakan pentingnya sikap guru terhadap inklusi, yaitu guru dengan sikap lebih positif terhadap inklusi akan lebih mamapu untuk mengatur intruksi dan kurikulum yang digunakan untuk siswa berkebutuhan khusus serta guru dengan sikap yang lebih positif dapat memiliki pendekatan yang lebih positif untuk inlusi.

Adanya perbedaan sikap guru terhadap inklusi tersebut, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rayner, 2007 dalam Ilahi (2015) menuliskan bahwa sikap guru sangat dipengaruhi oleh sifat dan beratnya kondisi ketidakmampuan yang dimiliki para siswa. Selain itu, Avramidis dan Norwich (2002) merangkum berbagai penelitian mengenai tiga faktor yang mempengaruhi sikap guru terhadap inklusi yaitu: (1) siswa; (2) Guru yang terdiri dari: gender, usia dan pengalaman mengajar, tingkat kelas yang diajar, pengalaman kontak dengan siswa berkebutuhan khusus, pelatihan, keyakinan guru dan pandangan sosio-politik; (3) Lingkungan pendidikan yaitu ketersediaan dukungan fasilitas di dalam kelas dan level sekolah (Center and Ward, 1987 dalam Avramidis dan Norwich, 2002).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas tentang sikap guru terhadap pendidikan inklusi. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap guru terhadap pendidikan inklusi yaitu sikap menerima dan sikap menolak atau sikap positif dan sikap negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar (2013). *Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif (sesuai Permendiknas No. 70 tahun 2009)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.
- Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar (2013). *Berbagai peraturan pendidikan khusus dan layanan khusus*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.
- Elisa, S., & Wrastari, A. T. (2013). Sikap guru terhadap pendidikan inklusi ditinjau dari faktor pembentuk sikap. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, 2 (01), 1-10.
- Ilahi, M.T. (2013). *Pendidikan inklusif (Konsep & Aplikasi)*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

-
- Kustawan, D. (2013). *Manajemen pendidikan inklusif (Kiat sukses mengelola pendidikan inklusif di sekolah umum & kejuruan)*. Jakarta timur: PT. Luxima metro media.
- Lasarie, E., & Gusniarty, U. (2009). Hubungan antara *self-efficacy* guru dengan sikap terhadap program pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Psikologia*, 4 (2), 42-48.
- Mahat, M. (2008). The development of a psychometrically-sound instrument to measure teachers' multidimensional attitudes toward inclusive education. *International Journal of Special Education*, 23 (1), 82-92.
- Taylor, W.R., & Ringlaben, P.R. (2012). Impacting pre-service teachers' attitudes toward inclusion. *Higher Education Studies*, 2 (3), 16-23.